



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah dan Upaya Mengatasi Kegagalan Pasar Komoditas Minyak Goreng

*Sumual D. T.^a, Christian R.^b, Rahmatullah R.^c, Khairrudin A.I^d, Fizikri L.^e
Maria Bernadette Nani^f, Renea Shinta Aminda^g*

a, b, c, d, e Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

f, g Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

* Corresponding author e-mail: 2110115042@mahasiswa.upnvj.ac.id

DOI : 10.32832/djip-uika.v4i3.15575

ABSTRAK

Salah satu komoditas yang paling penting dalam masyarakat Indonesia, minyak goreng menjadi semakin populer setiap tahun. Mengalami kegagalan pasar pada tahun 2021, yang menyebabkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap akses minyak goreng. Dengan terjadinya kegagalan pasar, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kebijakan subsidi pemerintah, yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menemukan dan memahami makna dari berbagai macam orang atau kelompok. Berdasarkan analisis penelitian, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi berupa program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Kebijakan subsidi ini berdampak signifikan terhadap masyarakat dimana bantuan yang didapatkan membuat masyarakat dapat tetap memperoleh pasokan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan integrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mewajibkan pelaku usaha minyak goreng mendaftarkan, mencegah kecurangan seperti penimbunan, dan memastikan ketersediaan serta harga terjangkau untuk masyarakat dan usaha kecil.

Kata kunci: minyak goreng, kegagalan pasar, kebijakan subsidi

Analysis of Government Subsidy Policy and Efforts to Overcome Market Failure of Cooking Oil Commodity

ABSTRACT

One of the most important commodities in Indonesian society, cooking oil is becoming more and more popular every year. It experienced a market failure in 2021, which caused public unrest and concern over access to cooking oil. With the occurrence of market failure, research is needed to find out the government's efforts to overcome this. The purpose of this study is to assess the government's subsidy policy, which is carried out to overcome market failure. This research uses descriptive qualitative methodology, which aims to find and understand the meaning of various people or groups. Based on the research analysis, the government issued a subsidy policy in the form of a direct cash transfer (BLT) program for the poor. This subsidy policy has a significant impact on the community where the assistance obtained allows the community to continue to obtain cooking oil supplies at a more affordable price. In addition, the integration policy through the National Industry Information System (SIINas) requires cooking oil businesses to register, prevents fraud such as hoarding, and ensures availability and affordable prices for the community and small businesses.

Keywords: cooking oil, market failure, subsidy policy

PENDAHULUAN

Minyak goreng adalah keutamaan bagi mayoritas masyarakat negara Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditas minyak goreng berpotensi dalam mengalami kelangkaan dan kegagalan dalam pasar. Komoditas minyak goreng yang mengalami kegagalan disebabkan oleh faktor-faktor umum seperti adanya kelangkaan pada bahan baku, fluktuasi harga, dan faktor eksternal adanya gangguan rantai pasokan. Menurut Barkatullah (2017:2), kelangkaan dan kegagalan memicu bahan pasokan minyak sawit mentah. Pemahaman ini menyebabkan terjadinya sebuah krisis yang terjadi pada eropa yang mempengaruhi peningkatan pada harga di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan sumber minyak goreng tertinggi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Minyak goreng memiliki rata-rata peningkatan 2,32% dihitung dari periode 2015-2020 (BPS). Meskipun pada periode ini segala kebutuhan minyak goreng dapat dipenuhi dengan baik (Rizal, 2022). Namun, pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022 Indonesia mengalami kegagalan pasar pada komoditas minyak goreng.

Kelangkaan dan kegagalan pasar yang dihadapi Indonesia merupakan sebuah keironian. Dikatakan ironi disebabkan karena Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir yang disebut CPO (*crude palm oil*). Dalam pengendaliannya pada tingkat konsumen, pemerintah terdahulu memberi respon dengan berbagai kebijakan yang berfokus subsidi minyak goreng oleh pemerintah. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena ada kurangnya pengawasan maupun transparansi distribusi minyak.

Oleh karena itu, analisis mendalam tentang kebijakan subsidi pemerintah dalam industri minyak goreng dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar menjadi sangat penting. Karya tulis ini akan mengulas berbagai aspek terkait dengan kebijakan tersebut dan akan mencoba memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara mengelola kestabilan pasar minyak goreng yang penting ini. Sebagai upaya menunjukkan kebaruan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti membandingkan penelitian ini dengan penelitian "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*". Didalam perbedaannya pada penelitian ini ditinjau tidak hanya dari perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melainkan juga dampak subsidi dan juga pengaruh harga CPO terhadap kegagalan pasar.

Kajian Teori

1. Kegagalan Pasar: Konsep kegagalan pasar awalnya muncul sebagai sarana untuk menjelaskan dalam istilah ekonomi mengapa perlunya pengeluaran

pemerintah. Menurut pematerinya, hal ini merupakan “penilaian normatif tentang peran pemerintah dan kemampuan pasar untuk membangun pertukaran yang saling menguntungkan” (Dahlman, 1979). Kegagalan yang terjadi pada pasar terjadi ketika pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien (Schwartz & Clements, 1999). Dalam kasus minyak goreng, kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya monopoli atau oligopoli dalam industri minyak goreng, yang dapat mengakibatkan harga yang tinggi dan kualitas yang buruk. Selain itu, kegagalan pasar juga dapat terjadi terlihatnya eksternalitas negatif, seperti pencemaran yang ada di lingkungan yang merupakan dampak dari pembuatan minyak goreng.

2. Subsidi Pemerintah: Dalam istilah yang paling umum, subsidi dapat didefinisikan sebagai bantuan pemerintah yang meningkatkan pendapatan produsen melebihi pendapatan yang dapat diperoleh tanpa subsidi. intervensi ini. Berdasarkan definisi ini, subsidi kepada konsumen mencakup kasus-kasus di mana pemerintah, sebagai produsen barang dan jasa, menjual outputnya dengan harga yang tidak mencerminkan seluruh biaya, termasuk pengembalian modal yang normal, atau memberikan kompensasi kepada sektor swasta yang melakukan hal tersebut (Salamon, 2021). Subsidi pemerintah dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar dengan memberikan insentif kepada produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam kasus minyak goreng, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah dan Upaya Mengatasi Kegagalan Pasar Komoditas Minyak Goreng” Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana jenis penelitian mencari dan memahami arti pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2023) pendekatan ini dapat menggambarkan sebuah fenomena secara seksama dan mampu menjelaskan bagaimana suatu isu atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari lebih dekat, sehingga penelitian ini dapat melihat bagaimana fenomena kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng dapat dianalisis melalui sudut pandang konsumen yang berasal dari masalah sosial. Penelitian ini juga menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Dimana pendekatan tersebut memusatkan perhatiannya pada perwujudan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat (Erawati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan krusial bagi masyarakat Indonesia karena termasuk kebutuhan dasar berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Karena dalam aktivitas sehari-hari hasil olahan kelapa sawit dimanfaatkan oleh hampir semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia, terutama minyak goreng dan mentega. (Universitas Andalas, n.d.).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian, pada Tahun 2017 industri kelapa sawit Indonesia sudah menjadi industri penghasil kelapa sawit yang memegang peranan yang krusial baik dalam lingkup domestik maupun lingkup internasional. Total hasil kelapa sawit negara Indonesia terutama hasil olahan kelapa sawit yang berupa minyak mentah, Indonesia memproduksi sekitar 64 juta ton hasil olahan kelapa sawit bagi kebutuhan lokal maupun pasar internasional, Indonesia menyokong sebanyak 35 juta ton atau sekitar 54% dari total kebutuhan hasil olahan kelapa sawit pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan estimasi yang dilakukan pada Tahun 2050 pasar internasional kemungkinan membutuhkan pasokan tambahan hasil bumi kelapa sawit sekitar 60-170 juta ton kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan penduduk di dunia yang pastinya akan bertambah seiring waktu berjalan, dan terkait lahan perkebunan kelapa sawit diasumsikan memerlukan tambahan sekitar 12-34 juta hektar tambahan lahan (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023). Indonesia adalah salah satu negara penghasil hasil bumi berupa kelapa sawit terbanyak di dunia dengan fokus produksi berada di daerah Sumatera, Kalimantan dan Papua. Berdasarkan urutan luas lahan perkebunan kelapa sawitnya dapat dilihat di Tabel berikut:

Tabel 1. Sepuluh Besar Provinsi di Indonesia dengan Lahan Terluas

Provinsi	Luas lahan (Ha)
Riau	2.858.700
Kalimantan Barat	2.014.500
Kalimantan Tengah	1.835.100
Sumatera Utara	1.507.500
Kalimantan Timur	1.395.700
Sumatera Selatan	1.171.500

Jambi	1.127.100
Aceh	475.000
Kalimantan Selatan	441.600
Sumatera Barat	440.400

Sumber: (Ahdiat, 2023)

Selain itu terdapat data perusahaan kelapa sawit yang berkembang hingga memperoleh penghasilan sebanyak triliunan rupiah pert tahunnya. Pada tabel berikut tercatat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology atau yang lebih dikenal dengan SMART berhasil menduduki peringkat pertama dengan pendapatan sekitar Rp 40,3 triliun pada tahun 2020. Lahan yang dikelola oleh PT SMART memiliki total luas sekitar 137.372 ha, dengan detail sebagai 106.428 ha merupakan lahan produktif dan 32.304 ha merupakan lahan plasma petani setempat. Berikut tabelnya:

Tabel 2. Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia Menurut Pendapatan

Nama	Nilai /Rp Triliun
SMART	40,3
Astra Agro Lestari	18,8
Salim Ivomas Pratama	14,4
Dharma Satya Nusantara	6,6
Mahkota Group	4,1
Sawit Sumbermas Sarana	4
PP London Sumatera Indonesia	3,5
Sampoerna Agro	3,5
Bakrie Sumatera Plantatio	2,5
Austindo Nusantara Jaya	2,2

Sumber: (Rizaty, 2022)

Berdasarkan tabel yang tertera di atas, walaupun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar kedua di dunia (Soraya, 2023), karena pada tahun 2021 terjadi kelangkaan minyak goreng. Pembelian minyak mentah (Crude Palm Oil) sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng, terutama minyak goreng kelapa sawit harus disesuaikan oleh pasar internasional. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemerintah tidak dapat mengatur harga minyak goreng. Ada beberapa penyebab yang melonjaknya harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng.

Penyebab pertama adalah harga CPO dunia yang sedang meningkat pada Tahun 2021 harga CPO dunia mengalami peningkatan yang sangat drastis.



Sumber: (Trading Economics, 2023)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya harga minyak mentah kelapa sawit (Dihni, 2022):

1. Pertama, penyebab adanya penurunan produksi minyak mentah kelapa sawit di negara-negara penghasil akibat pandemi Covid-19, kelangkaan tenaga kerja, keterbatasan pupuk dan gangguan cuaca. Contohnya di Indonesia pada Tahun 2021 Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa jumlah produksi minyak mentah (*Crude Palm Oil*) pada 2021 sejumlah 46,88 juta ton turun 0,31% tahun sebelumnya yang menghasilkan sebanyak 47,03 ton.

2. Kedua, permintaan minyak mentah kelapa sawit terutama CPO (Crude Palm Oil) mengalami eskalasi di pasar lokal maupun pasar internasional. Untuk kebutuhan masyarakat akan minyak kelapa sawit di dalam negeri saja terjadi peningkatan sebanyak 6% dari 17,34 juta ton pada tahun 2020 menjadi 18,42 juta ton pada tahun 2021.
3. Ketiga, terjadinya fenomena commodity supercycle, fenomena tersebut merupakan keadaan dimana harga suatu komoditas tertentu mengalami kenaikan harga dalam waktu yang cukup lama di masa pandemi covid-19 yang melahirkan keadaan spekulasi di pasar yang tidak relevan dengan stok yang ada sehingga menyebabkan krisis di kalangan masyarakat, salah satunya adalah pasar minyak mentah. Besarnya insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai cara yang dilakukan negara-negara dunia selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan semakin banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga memicu inflasi.

Ada faktor lain yang menyebabkan harga dan kelangkaan minyak goreng meningkat selain peningkatan harga CPO. Adanya praktik kartel atau mafia minyak goreng merupakan penyebab kedua. Hal ini disampaikan oleh Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menemukan alat bukti selama proses penegakan hukum terhadap kartel atau mafia minyak goreng. Menurut pernyataan Direktur Investigasi KPPU Goppera Panggabean, hasilnya memungkinkan penegakan hukum untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf c (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang atau jasa) (Karunia & Djumena, 2022).

Bukti lainnya adalah minimnya persediaan minyak goreng di pasaran, berdasarkan pernyataan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) Sudaryono menyatakan bahwa ketersediaan minyak goreng curah menjadi langka, hal tersebut menyebabkan stok milik penjual atau pedagang menjadi tidak aman. Kelangkaan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yakni, pertama, keterbatasan moda transportasi untuk mengantar persediaan minyak goreng kelapa sawit. Kedua akibat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kelapa sawit yang awalnya Rp 11.500 menjadi Rp 14.000, dikarenakan intervensi pemerintah membuat produsen mengurangi produksi minyak goreng namun permintaan minyak goreng masyarakat tetap melonjak. (Respati & Sukmana, 2022)

Pemerintah juga menemukan bukti penimbunan minyak goreng kelapa sawit saat sidak Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Polda pada 18 Februari 2022. Didapat 1,20 juta kilogram minyak goreng kelapa sawit, dengan 1,1 juta

kilogram siap untuk didistribusikan. Minyak goreng yang ditemukan adalah minyak kemasan yang dikenal dengan merek seperti Bimoli, Delima, dan Amanda. Minyak goreng kelapa sawit ini disimpan di tiga gudang berbeda: PT Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) Tbk. Di gudang PT Indomarco Prismatama, ada 1.184 kotak, atau 23.680 pcs, minyak goreng kelapa sawit kemasan 1-liter merek Parveen. Di gudang PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, ada minyak goreng kelapa sawit kemasan 1-liter merek Parveen. (Rachmawati, 2022).

Selain karena praktik penimbunan baik yang disengaja atau tidak disengaja berdasarkan pernyataan Ombudsman Republik Indonesia lembaga pengawas pelayanan publik, meningkatnya harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng terjadi karena perbedaan *domestic market obligation* (DMO) minyak sawit yang dilaporkan dengan yang terealisasi. Kebijakan DMO yang tidak menemukan antara eksportir CPO dengan produsen minyak goreng menyebabkan adanya aktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha UMKM yang meningkatkan stok minyak goreng sebagai respon karena belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng secara berkala. (Catriana & Sukmana, 2022).

Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia telah memicu gelombang kepanikan di kalangan konsumen, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai "*panic buying*." Pandangan Nasution (2022) menyoroti dampak ekonomi yang merugikan, dengan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian di pasar, memicu reaksi panik di kalangan masyarakat. Konsep kelangkaan menjadi pendorong utama perilaku *panic buying*. Ketika harga minyak goreng naik, masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan produk tersebut di masa depan. Analisis Yuen (2020) tentang *panic buying* menyoroti bahwa kekhawatiran akan kelangkaan barang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian berlebihan, melebihi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga yang membuat produsen hingga pengecer, mungkin kesulitan menangani lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi *panic buying* melibatkan pemiskinan stok di tingkat konsumen akhir, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merugikan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Harga produk minyak goreng terus menerus mengalami kenaikan secara berkala pada akhir tahun 2021 lalu. Memasuki Tahun 2022 harga minyak goreng pun masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan bahkan terus naik. Grafik harga produk minyak goreng dapat dilihat pada gambar berikut (Javier, 2022).



Gambar 1. Grafik Harga Minyak Goreng Nasional

Dalam menyasiasi kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di pasar domestik, pada awal Januari Tahun 2022, Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan dengan cara menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Selain kebijakan subsidi pemerintah melakukan kebijakan lainnya yakni kebijakan *replanting*, kebijakan ini bertujuan untuk menambah jumlah hasil bumi terutama kelapa sawit, kebijakan ini dilakukan dengan cara bantuan keuangan kepada masyarakat, peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi, peningkatan infrastruktur dan fasilitas perdagangan, dan penguatan organisasi petani dan pelaku usaha sawit melalui penambahan stok bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023).

Karena harga minyak goreng yang meningkat dengan pesat di Indonesia membuat hal tersebut menjadi topik yang hangat karena sangatlah ironis mengingat fakta bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Sebagai negara salah satu negara penghasil minyak mentah namun tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negerinya sendiri.

Masyarakat kini banyak membicarakan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini dikarenakan minyak goreng, yang dapat digunakan untuk menggoreng, memanggang, dan memasak, merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa konsumen sangat terdampak oleh kenaikan harga minyak goreng. Dampak ini terbagi dalam dua kategori: dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak langsung dari kenaikan harga minyak goreng adalah peningkatan biaya hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan minyak goreng merupakan bahan pokok yang digunakan dalam berbagai makanan. Dengan naiknya harga minyak goreng, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli bahan makanan tersebut. Dampak langsung ini tentunya akan lebih terasa bagi masyarakat yang memiliki daya beli yang rendah. Mereka akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan pangan.

Dampak tidak langsung dari kenaikan harga minyak goreng adalah penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli minyak goreng. Akibatnya, mereka akan memiliki lebih sedikit dana untuk membeli barang atau jasa lainnya. Dampak tidak langsung ini juga akan berdampak pada perekonomian secara umum. Hal ini dikarenakan masyarakat akan mengurangi konsumsi barang atau jasa lainnya, sehingga akan menurunkan permintaan.

Selain itu, kenaikan harga minyak goreng juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat atau pelaku usaha kemungkinan akan beralih menggunakan minyak goreng yang lebih murah dan bermutu rendah, yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yang dihasilkan. Selain itu untuk menghemat pengeluaran minyak goreng, tidak jarang penggunaan minyak goreng dilakukan secara berlebihan atau minyak goreng yang telah dipakai berkali-kali. Sehingga pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Tidak hanya itu, beban psikologis juga dirasakan masyarakat, terutama para pekerja yang pendapatannya tetap dan belum memenuhi Upah Minimum Regional.

Produsen minyak goreng di Indonesia juga sangat terdampak oleh kenaikan harga minyak goreng. Meskipun Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, produsen CPO di Indonesia tidak selalu mengalami kenaikan pendapatan sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak goreng. Tingginya harga minyak memiliki dampak kompleks pada berbagai aspek perusahaan, terutama dalam sektor energi dan produksi. Kenaikan ini tidak hanya menyebabkan penurunan penawaran agregat karena pembelian energi yang lebih mahal, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap biaya produksi. Saat perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi, mereka cenderung menghadapi dilema antara mempertahankan produktivitas dan mengoptimalkan efisiensi.

Dalam konteks produksi minyak goreng, kenaikan harga CPO internasional menjadi kendala utama. Meskipun terdapat permintaan yang terus meningkat di pasar domestik, perusahaan kesulitan memproduksi dalam skala besar karena biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan harga jual. Kebutuhan untuk merekrut

lebih banyak karyawan untuk meningkatkan hasil produksi juga menjadi tantangan, karena hal ini dapat memberikan tekanan tambahan pada laba perusahaan.

Selain itu, kondisi logistik yang sulit, terutama selama pandemi COVID-19, semakin memperburuk situasi. Harga pengangkutan truk kontainer dan biaya pengiriman yang melonjak membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendistribusikan produk mereka. Hal ini menciptakan lingkaran sulit di mana peningkatan biaya produksi dan distribusi secara bersamaan berkontribusi pada tantangan ekonomi yang signifikan.

Kondisi ini memberikan tekanan tambahan pada perusahaan minyak goreng dan sektor terkait, memaksa mereka untuk mencari strategi baru untuk menjaga daya saing dan kelangsungan bisnis. Dengan perubahan ini, perusahaan mungkin harus mengkaji ulang model bisnis mereka, mencari solusi efisien dalam rantai pasokan, dan mencari cara untuk mengatasi tantangan finansial yang dihadapi.

Kenaikan harga minyak goreng memiliki dampak signifikan terhadap konsumen ataupun produsen. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, berbagai departemen milik pemerintah bekerja sama menerapkan berbagai macam peraturan untuk memastikan keberadaan dan harga minyak goreng kelapa sawit yang lebih ekonomis agar masyarakat bisa mendapatkannya. Program yang dimaksud antara lain Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Program Minyak Goreng Sawit Curah (MGS), dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Program BLT Minyak Nabati merupakan program bantuan yang dicetuskan oleh pemerintahan yang dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. Tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan beli masyarakat seiring kenaikan harga komoditas yang terjadi. Bantuan ini menyasar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah dengan detail sebanyak 40% penduduk Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022).

Program bantuan minyak goreng kelapa sawit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Sembako dan Kelompok Program Bantuan Tunai kepada Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima, dan Nelayan (BTPKLWN). Program Bansos Sembako dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan jumlah 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), meliputi 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Kartu Sembako) dan 1,85 juta Program Keluarga Harapan tidak termasuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai.

Besaran bantuan sebesar Rp 100.000/KPM setiap bulan yang disalurkan setiap tiga bulan lewat PT Pos Indonesia. Sementara di BTPKLWN, koordinasi TNI dan POLRI memberikan bantuan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima dan warung di 514 kabupaten/kota, khususnya yang berjualan makanan dan gorengan. Besaran

dan jangka waktu pembayaran bantuan kepada PKL akan sesuai dengan apa yang diterima KPM setiap bulannya sebagai bagian dari program bantuan sosialnya.

BLT minyak nabati disiapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan anggaran PEN tahun 2022. Program ini dilaksanakan sejak April 2022, dan anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp6,945 Miliar, dimana Rp6,195 Miliar untuk program bansos dan Rp0,75 Triliun untuk BTPKLWN (Kemenkeu, 2022, Kemenko Perekonomian, 2022). Kebijakan terkait minyak bumi yang selanjutnya adalah program pengendalian dan pemantauan distribusi massal minyak sawit nabati (MGS). Penyelenggaraan program ini mulanya dirancang oleh Kementerian Perindustrian dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 terkait Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Lokal. Usaha mikro atau kecil yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), yang kemudian dirombak dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 10, 12, dan 26 Tahun 2022. Program pengadaan minyak goreng curah ialah bertujuan terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro atau kecil. (Kementerian Keuangan, 2022; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diimplementasikan oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng. Pemenuhan Kebutuhan Dasar BLT Minyak Goreng bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, khususnya kebutuhan minyak goreng. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng dapat tetap memperoleh pasokan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau.

Melindungi Daya Beli Masyarakat Kenaikan harga minyak goreng dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Melalui BLT Minyak Goreng, pemerintah memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung sehingga mereka tetap dapat membeli minyak goreng meskipun harganya naik. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga Dengan adanya bantuan tunai untuk pembelian minyak goreng, keluarga yang terdampak kenaikan harga dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Ini membantu mencegah kemungkinan terjadinya penurunan standar hidup dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Mendorong Konsumsi dan Perekonomian Melalui BLT Minyak Goreng, pemerintah juga dapat mendorong konsumsi di tingkat rumah tangga. Bantuan ini dapat memicu aktivitas ekonomi karena masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap minyak goreng, sehingga meningkatkan permintaan dan mendukung sektor ekonomi terkait. Sosialisasi dan Edukasi Program BLT Minyak Goreng juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyebab kenaikan harga minyak goreng, upaya pemerintah untuk membantu, dan cara mengelola keuangan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam kebijakan tersebut, pelaku usaha di bidang minyak goreng harus mendaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang memuat rencana penyaluran termasuk jumlah yang rencananya diberikan kepada masyarakat, data jaringan penyaluran bantuan minyak goreng di kabupaten/kota, dan waktu penyaluran. Selain itu, permohonan pendanaan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan dengan mengunggah laporan ringkasan, rincian pajak, dan bukti transaksi penjualan ke pihak penjual reguler melalui sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) yang terhubung dengan SIINas.

Selain penghasil minyak goreng kelapa sawit, pihak penyalur yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi juga harus melakukan registrasi ke SIMIRAH agar dapat mengetahui detail lokasi terkait jumlah persediaan dilakukan secara langsung. Program MGS dilaksanakan dengan membiayai perbedaan harga dengan dana BPDPKS. Harga pengiriman dari pihak penghasil minyak goreng kelapa sawit ke masyarakat yang merupakan pengguna minyak goreng kelapa sawit diatur dalam Peraturan Dirjen Departemen Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 dengan harga jual maksimal dari pabrik ke pihak penyalur adalah Rp 13.333/kg, harga jual dari distributor ke distributor.

Harga eceran tertinggi Rp 13.333/kg. Harga eceran menuju konsumen sebesar Rp 14.389/kg dan harga eceran maksimal menuju masyarakat sebagai pengguna minyak goreng kelapa sawit sebesar Rp 15.500/kg berdasarkan Harga Eceran Tertinggi. Penetapan harga tersebut dilakukan secara memperhitungkan perbedaan harga acuan keekonomian (HAK) yang ditentukan dalam keputusan Direktur BPDPKS atas dasar keputusan rapat koordinasi di bidang perekonomian bersama Harga Eceran Tertinggi. Program MGS curah ini akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan klaim pembayaran pada atau sebelum tanggal 31 Juli 2022 yang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 disahkan pada tanggal 23 Mei 2022. Bersamaan dengan berakhirnya program MGS Program MGS, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Minyak Goreng Massa Umum (MGCR).

Program Minyak Goreng Curah Rakyat bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran minyak goreng curah dengan harga yang lebih ekonomis kepada masyarakat konsumen minyak goreng curah. Keterjangkauan menjadi target HET yang ditetapkan pada Maret 2022 melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 dengan harga konsumen Rp 14.000/lt atau Rp 15.500/kg. Sasaran penyaluran program ini adalah 4.444.10.000 toko di pasar lokal yang

tersebar di seluruh Indonesia. Minyak goreng curah disalurkan melalui program peningkatan dengan minyak goreng curah yang dikemas dengan merek MinyakKita. Minyak goreng kemasan curah tersebut lebih dikenal dengan sebutan minyak goreng kemasan konsumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41.

Berbeda dengan program MGS, MGCR sudah tidak menggunakan sistem keuangan melalui BPDPKS atau subsidi lainnya melainkan melalui kewajiban permintaan nasional (*domestic market bonds/DMOs*) dan tanggung jawab penjualan produk dengan harga dalam negeri (*domestic market*) kewajiban pasar domestik /DMO). kewajiban harga/OPD). Penyelesaian Kebijakan pasar domestik akan dikonfirmasi oleh tim pengesahan yang dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan. Hasil yang sudah diperiksa akan digunakan untuk menentukan jumlah persetujuan penjualan ke luar negeri dan tingkat penggandaannya.

SIMIRAH dapat dipakai sebagai forum digital dalam implementasi program MGCR oleh para pelaku ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh kementerian, organisasi, dan/atau pemerintah daerah terkait. Penggunaan MGCR diatur dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022 tentang SIMIRAH. Program MGCR juga pula melibatkan aplikasi digital Perusahaan Distribusi Besar dan Logistik (PUJLE) yang wajib mendistribusikan sesuai dengan kebijakan pasar yang berlaku terkait dengan jumlah yang diterima oleh produsen ke pengecer. Kemudian hasil penyampaiannya kemudian dilaporkan ke Indonesia National Single Window (SINSW) yang selanjutnya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program Minyak Goreng Curah Rakyat.

SIMPULAN

Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia menjadi isu hangat yang mendalam dan berdampak signifikan pada berbagai aspek masyarakat dan industri. Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi pada tahun 2021, memicu kepanikan dan fenomena *panic buying* di kalangan konsumen. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng antara lain adalah meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional akibat gangguan produksi dan permintaan yang tinggi. Selain itu, praktik kartel atau mafia minyak goreng juga diidentifikasi sebagai penyebab lainnya, dengan temuan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pemerintah Indonesia merespons kenaikan harga dengan berbagai kebijakan, termasuk program subsidi, replanting kelapa sawit, dan pengelolaan distribusi

minyak goreng curah. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng memberikan perlindungan daya beli kepada masyarakat, sementara program pengelolaan distribusi melibatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Meskipun langkah-langkah tersebut membantu meredakan dampak kenaikan harga, tantangan yang dihadapi oleh sektor minyak goreng masih kompleks. Kebijakan jangka panjang, termasuk peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan pengawasan terhadap praktik kartel, perlu terus diimplementasikan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik.

Dampak kenaikan harga minyak goreng mencakup peningkatan biaya hidup, penurunan daya beli masyarakat, dan risiko terhadap kesehatan. Bagi produsen, kenaikan harga CPO tidak selalu diikuti oleh kenaikan laba, dan mereka menghadapi tantangan dalam menjaga daya saing dan kelangsungan bisnis. Dampak kenaikan harga minyak goreng sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, melalui peningkatan biaya hidup dan penurunan daya beli. Fenomena "*panic buying*" menciptakan ketidakpastian di pasar dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, produsen minyak goreng juga menghadapi tantangan kompleks, termasuk kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Dengan demikian, situasi ini menciptakan kompleksitas ekonomi dan sosial yang perlu diatasi secara komprehensif. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan menunjukkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, tetapi perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Ahdiat, A. (2023, May 11). Ini Provinsi dengan Perkebunan Kelapa Sawit Terbesar pada 2022. Databoks. Retrieved December 2, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-dengan-perkebunan-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>
- Anas. (2018). 37 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang te. IAIN Kudus Repository. Retrieved December 2, 2023, from <http://repository.iainkudus.ac.id/2400/6/6.%20BAB%20III.pdf>
- Barkatullah, Abdul Halim. Framework Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen Di Indonesia. Vol. 53, 2016.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. NBER Working Papers, 6, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Catriana, E., & Sukmana, Y. (2022, March 16). Ini Penyebab Minyak Goreng Langka Versi Ombudsman. Money Kompas. Retrieved December 2, 2023, from

<https://money.kompas.com/read/2022/03/16/060432526/ini-penyebab-minyak-goreng-langka-versi-ombudsman>

- Creswell, J. W. (2023, June 16). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. A Concise Introduction to Mixed Methods Research. Retrieved December 2, 2023, from <https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-concise-introduction-to-mixed-methods-research/book266037#reviews>
- Dahlman, C.J. (1979, April). The problem of externality. *Journal of Law and Economics*, 22, 141–162
- Dihni, V. A. (2022, February 3). Gapki: Produksi CPO Turun 0,31% pada 2021, Ini Faktornya. *Databoks*. Retrieved December 2, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/gapki-produksi-cpo-turun-031-pada-2021-ini-faktornya>
- Earth, G. (2019). Kabupaten_Rokan_Hulu. *Id.Wikipedia.Org*, 1(1), 28–35. https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_rokan_hulu
- Erawati, A. (2022, June 7). Analisis Wacana Kritis Nourman Fairclough terhadap Jokowi yang Menyentil Menteriya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Retrieved December 2, 2023, from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4114>
- Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017, July 29). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Neliti*. Retrieved December 2, 2023, from <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh>
- Javier, F. (2022, March 31). Perkembangan Harga Minyak Goreng pada 29 Maret 2022 - Data Tempo.co. *Data*. Retrieved December 2, 2023, from <https://data.tempo.co/data/1380/perkembangan-harga-minyak-goreng-pada-29-maret-2022>
- Karunia, A. M., & Djumena, E. (2022, March 28). Ini Update Investigasi KPPU soal Kartel Minyak Goreng. *Money Kompas*. Retrieved December 2, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2022/03/28/090600026/ini-update-investigasi-kppu-soal-kartel-minyak-goreng>
- Nasution, A. (2022). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(2), 113–120. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. (2023, June 16). Kelapa Sawit Semakin Menjadi Andalan Ekonomi Nasional. *YouTube*. Retrieved December 2, 2023, from <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/22-informasi->
- Rachmawati. (2022, February 20). Berawal dari Sidak, Ini Kronologi Penemuan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng di Deli Serdang Halaman all - Kompas.com. *Regional - KOMPAS.com*. Retrieved December 2, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2022/02/20/083500878/berawal-dari-sidak-ini-kronologi-penemuan-1-1-juta-kg-minyak-goreng-di-deli?page=all>
- Rahayu, R. N. (2023, June 16). ROCHANI NANI RAHAYU26INTELEKTIVA –VOL 3 NO 8 APRIL 2022E-ISSN 2686 -5661KENAIKAN HARGAMINYAK GORENG KELAPA SAWIT DI INDONESIASEBUAH ANALISIS BERITAKOMPAS ON

- LINE. *Jurnallintelektiva*. Retrieved December 2, 2023, from <https://jurnallintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731/554>
- Ramadhan, F. L., & Kurniawan, R. R. (2022, May 24). *Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia*. OSF. Retrieved December 2, 2023, from <https://osf.io/preprints/pk83z/>
- Respati, A. R., & Sukmana, Y. (2022, March 25). *Minyak Goreng Curah Mulai Langka, Pedagang Pasar Ungkap Penyebabnya* Halaman all - Kompas.com. Money Kompas. Retrieved December 2, 2023, from <https://money.kompas.com/read/2022/03/25/174552426/minyak-goreng-curah-mulai-langka-pedagang-pasar-ungkap-penyebabnya?page=all>
- Review, P. L. (2023). 1;2;3. 09(September), 101–119.
- Rizal, J.G. & Galih, B. (2022). [Kabar Data] *Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Indonesia*. Kompas.com, 04 Februari 2022, 12.22 WIB, <https://www.kompas.com/tag/online>, diakses, 29 Maret 2022.
- Rizaty, M. A. (2022, March 14). *10 Perusahaan Sawit Terbesar di Indonesia Tahun 2020, SMART di Posisi Puncak*. Databoks. Retrieved December 2, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/10-perusahaan-sawit-terbesar-di-indonesia-tahun-2020-smart-di-posisi-puncak>
- Salamon, L. M. (2021). *Market failure. The Nature of the Nonprofit Sector*, 228–229. <https://doi.org/10.4324/9780367696559-20>
- Schwartz, G., & Clements, B. (1999). *Government subsidies. Journal of Economic Surveys*, 13(2), 119–148. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00079>
- Soraya, D. A. (2023, August 23). *Jadi Produsen Sawit Terbesar Dunia, Indonesia Justru Kalah dari Dua Negara Ini* | Republika Online. Republika Ekonomi. Retrieved December 2, 2023, from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzund7457/jadi-produsen-sawit-terbesar-dunia-indonesia-justru-kalah-dari-dua-negara-ini>
- Trading Economics. (2023, 12 4). *Minyak kelapa sawit - Kontrak Berjangka - Harga | 1980-2023 Data | 2024-2025 Perkiraan. ID | TRADINGECONOMICS.COM*. Retrieved December 2, 2023, from <https://id.tradingeconomics.com/commodity/palm-oil>
- Universitas Andalas. (n.d.). *BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan sal. Scholar UNAND*. Retrieved December 2, 2023, from <http://scholar.unand.ac.id/17175/2/BAB%201.pdf>
- Wulandari, R. (n.d.). *View of Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Marindal I.pdf*.
- Yuen, K. F., Wang, X., Ma, F., & Li, K. X. 2020. *The psychological causes of panic buying following a health crisis. International journal of environmental research and public health*, 17(10)